# Arti Penting Kedaulatan Negara

Seandainya ada survei kepada warga negara di seluruh dunia tentang apa yang mereka didambakan dengan negaranya, tentu dapat kita perkirakan jawabnya bahwa kedaulatan negaranyalah yang mereka inginkan, sehingga dapat mengatur dan menentukan rumah tangga negaranya tanpa intervensi dari luar. Dengan kedaulatannya itu, visi dan misinya menciptakan negara yang maju, rakyatnya sejahtera dapat tercapai.

Pada prinsipnya, tiap negara memiliki kedaulatan sehingga tak ada satu negara pun yang berhak menggangu kedaulatannya itu. Hingga kini, intervensi dan agresi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang menjadi momok yang sangat menakutkan. Karena intervensi terhadap suatu negara dalam menjalankan kebijakan dalam negeri dan luar negerinya merupakan salah satu bentuk penjajahan yang tersirat.

Negara Palestina adalah salah satu contoh dari negara yang eksistensinya nyaris tidak ada, karena kedaulatannya terus diobok-obok oleh kepentingan luar. Intervensi pihak asing memiliki andil besar terpuruknya negara Palestina, terutama soal keamanan negara yang saat ini hampir terjadi perang saudara di negara tersebut. Menurut The New York Time, majalah terbitan AS, edisi 14 Februari 2006, rentetan peristiwa politik akhir-akhir merupakan bagian dari skenario penggulingan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Ismail Haniya dari Partai Hamas. Meskipun Haniya telah terpilih secara demokratis pada Pemilu beberapa bulan yang lalu, namun eksistensinya terancam.

**Arti Penting Kedaulatan**
Saat ini hubungan internasional bangsa-bangsa di sebagian pelosok dunia kurang harmonis dan terjadi diskriminasi terhadap negara-negara berkembang. Meskipun diskriminasi itu tidak separah yang terjadi di abad sebelumnya, ketika Perang Dunia ke I dan Perang Dunia ke II, namun aroma ketidakadilan yang dilakukan oleh suatu negara atau komunitas negara terhadap negara dan komunitas negara lainnya saat ini masih terjadi. Prinsip “hukum rimba” masih sering terjadi: negara yang kuat bisa menentukan kebijakan hukum bagi negara lemah. Negara-negara lemah pun tidak bisa berkutik dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara-negara maju.

Suatu hal wajar apabila suatu negara yang maju menjunjung terciptanya demokrasi di negaranya dan mereka memiliki keinginan untuk mengimpor sistem tersebut ke negara lain. Sosialisasi demokrasi dan program oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang cukup berhasil mereka realisasikan. Beberapa negara berkembang kini sudah mulai mengadopsi sistem tersebut.

Namun, di balik keberhasilan itu, kini ada kecenderungan negara-negara kuat mensosialisasikan demokrasi dengan cara-cara yang tidak demokratis. Kasus yang terjadi di Aljazair yang telah sukses mengadakan Pemilu secara demokratis dan dimenangkan oleh Partai FIS, dan yang masih hangat suksesnya Palestina dalam mengadakan Pemilu dan Partai Hamas sebagai pemenangnya, ternyata kemenangan itu tidak diterima oleh negara-negara Barat.

Fenomena itu menunjukkan ada suatu paradoks dari kebijakan luar negeri yang negara-negara Barat. Di satu sisi mereka begitu sukses mensosialisasikan sistem demokrasi, tapi di sisi lain mereka harus mengingkari sendiri hasil yang demokratis. Padahal intervensi mereka dalam mengatur rumah tangga negara lain bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu: justice (keadilan), freedom (kebebasan), dan solidarity (solidaritas). Ketiga prinsif tersebut secara substantif sangat menjunjung terciptanya negara yang berdaulat.

**Pelajaran Bagi Indonesia**
Dua contoh negara yang mengalami kehancuran dalam usaha menciptakan kedaulatan negaranya itu, mestinya bisa dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia, yang saat ini sedang membangun sistem yang demokratis. Pijakan yang paling berharga untuk menciptakan sistem yang demokratis adalah kedaulatan sebuah bangsa. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang bisa menentukan nasib bangsanya sendiri (otonom), tanpa intervensi negara mana pun.

Untuk mewujudkan itu semua, Indonesia harus meninggalkan ketergantungannya kepada negara lain. Salah satu bentuk yang akan mengganggu kedaulatan adalah utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia kepada IMF tak bisa dipungkiri sangat mengganggu otonomi berbangsa dan bernegara kita. Dari sisi historis terpuruknya Palestina yang tergadai kedaulatannya, disebabkan ketergantungannya terhadap negara lain (negara-negara donor).

Dengan latar belakang hancurnya kedaulatan Palestina tersebut, seharusnya Pemerintah kita segera mengambil kebijakan secara revolusioner untuk menghentikan kebiasaan utang ke negara-negara donor. Karena ternyata alokasi utang tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti bagi perbaikan bangsa ini. Malah yang terjadi justru terciptanya masalah baru dari penggunaan dana bantuan luar negeri tersebut dengan pengalokasian tidak tepat sasaran alias mengalami kebocoran di sana-sini (dikorupsi).